

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk a. menganalisis apa kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan b. bagaimana bentuk pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan keputusan PPK kepada pelanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan mengkaji regulasi yang berlaku dan praktik pengawasan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan tugasnya dalam menjaga netralitas ASN pada pemilihan umum dan bagaimana bentuk pengawasan Bawaslu terhadap tindaklanjut BKN kepada pelaku pelanggaran netralitas hingga penjatuhan sanksi oleh PPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang mengkaji peraturan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil dari penelitian ini ialah a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan pemilu juga berwenang dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum; dan b. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap penjatuhan sanksi kepada para pelanggar netralitas ASN dalam pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Jambi berkoordinasi langsung dengan BKN dan PPK untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Kewenangan, Badan Pengawas Pemilu, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum.*

ABSTRACT

The objectives of this study are to a. analyze what is the authority of the Jambi Provincial Election Supervisory Agency on the Neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 General Election; and b. what is the form of supervision of the Jambi Provincial Election Supervisory Agency on the implementation of the Civil Service Supervisory Officer's decision on violators of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the 2024 General Election. By examining the applicable regulations and supervisory practices in the field, this study aims to identify the extent to which the Jambi Provincial Election Supervisory Board has carried out its duties in maintaining the neutrality of the State Civil Apparatus in the general election and how the form of supervision of the General Election Supervisory Board on the follow-up of the State Civil Service Agency to the perpetrators of neutrality violations until the imposition of sanctions by the Civil Service Supervisory Officer. The method used in this research is empirical juridical, which is a type of research that examines applicable regulations and what happens in reality in society. The results of this study are a. That the Jambi Provincial Election Supervisory Board as an institution authorized to oversee the implementation of general elections is also authorized to supervise and handle violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in general elections; and b. That in supervising the imposition of sanctions on violators of the neutrality of the State Civil Apparatus in general elections, the State Civil Service is authorized to impose sanctions on violators of the neutrality of the State Civil Apparatus in general elections.

Keywords: *Authority, Election Supervisory Board, State Civil Apparatus, General*